

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Tahun 2013-2018

Rencana strategis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat 2013 – 2018 adalah dokumen perencanaan dinas untuk periode 5 (lima) tahunan merupakan penjabaran dari visi dan misi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat yang dituangkan dalam strategi pembangunan daerah berupa kebijakan pendapatan dan belanja, program dan kegiatan pembangunan yang disertai dengan perencanaan penganggaran sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 yang hendak dicapai dalam tahapan kedua pembangunan jangka panjang daerah provinsi Jawa Barat yaitu **“Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua”** hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, dan penyempurnaan terhadap sistem, kebijakan, peraturan perundang-undangan bidang pendapatan termasuk pembinaan terhadap akhlak dan perilaku aparatur serta pengendalian manajemen, agar tercapai efektivitas dan produktivitas dalam pelaksanaan pemerintahan.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pengelolaan pendapatan yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Jangka Panjang Daerah (PJPD) 2005 – 2025 dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PJMD) 2013 - 2018, maupun dalam kebijakan strategis bidang pendapatan daerah

Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat menetapkan Rencana Strategis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, kegiatan serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat dalam pencapaian visi dan misi organisasi pada tahun 2013-2018.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat dijiwai oleh semangat dan komitmen untuk melakukan reformasi pada sektor pengelolaan pendapatan daerah dalam mewujudkan peningkatan pendapatan daerah yang dituangkan dalam Visi dan Misi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.

2.1.1 Visi dan Misi

Visi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat dapat dirumuskan sebagai berikut :

**Menjadi Pengelola Pendapatan Daerah yang Amanah
dan Akuntabel**

Misi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan Kapasitas Pendapatan Daerah Yang Makin Optimal**
- 2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat Yang Berdaya Saing**

2.1.2 Tujuan , Sasaran dan Indikator Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Tujuan yang akan dicapai ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategic serta kemampuan sumberdaya organisasi yang tersedia maupun perlu dikembangkan selama kurun renstra Dinas Pendapatan Yaitu antara tahun 2013-2018. Ketersediaan tujuan ini akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indicator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran secara kuantitatif untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap Indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran Diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu atau tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategik.

Setelah mempertimbangkan rumusan visi dan misi operasionalnya serta isu-isu strategik yang ada, maka tujuan dan sasaran Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

Untuk Misi Pertama : Meningkatkan Kapasitas Pendapatan Daerah yang makin Optimal, tujuan yang dirumuskan meliputi :

1. Meningkatkan Penerimaan Daerah yang makin optimal, dengan Sasaran : tercapainya Penerimaan Pendapatan Daerah, dengan indikatornya Yaitu :
 - a) Kenaikan pendapatan daerah antara tahun anggaran
 - b) Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah (diluar dana BOS)

2. Meningkatkan potensi penerimaan pendapatan daerah, dengan sasaran :
 - a) Terdatanya potensi Pajak Daerah dan bukan Pajak Daerah dengan indikatornya yaitu :
 - 1) Proporsi Pertumbuhan Jumlah Potensi Wajib Pajak :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Pajak Air Permukaan
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - 2) Jumlah Wajib Retribusi
 - b) Jumlah Objek Penerimaan diluar pajak daerah dan retribusi daerah
 - c) Efektifnya pemungutan seluruh potensi penerimaan pendapatan daerah, dengan indikatornya yaitu :
 - 1) Potensi wajib pajak yang terpungut
 - 2) Potensi Wajib Retribusi yang terpungut
 - 3) Potensi objek penerimaan diluar pajak daerah dan retribusi daerah yang terpungut/ diterima

Untuk Misi Kedua : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat yang Berdaya Saing, tujuan yang dirumuskan meliputi :

1. Meningkatkan kemampuan Aparatur yang berkompeten dan terpercaya, dengan sasaran : Meningkatnya kualitas aparatur dengan indikatornya yaitu :
 - a) Aparatur yang telah mengikuti pendidikan formal
 - b) Aparatur yang telah mengikuti pendidikan fungsional
 - c) Aparatur yang telah mengikuti pendidikan teknis substantif
2. Mewujudkan kepuasan pelayanan prima dengan sasaran :
 - a) Meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan pengelolaan pendapatan daerah, dengan indikatornya yaitu : Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)
 - b) Meningkatnya ketersediaan sarana, prasarana dan ketatalaksanaan pelayanan publik yang menopang pengelolaan pendapatan daerah, dengan indikatornya :
 - 1) Rasio cakupan sentra layanan perpajakan daerah terhadap wajib pajak per hari yang dilayani antar tahun anggaran.
 - 2) Ketersediaan Standar Operasional Prosedur terhadap kebutuhan
 - 3) Ketersediaan Standar pelayanan terhadap kebutuhan
 - c) Meningkatnya modernisasi informasi layanan pendapatan daerah dengan indikatornya yaitu :
 - 1) Tingkat gangguan jaringan dan sistem
 - 2) Tingkat gangguan penggunaan perangkat keras teknologi Informasi

3. Memantapkan kinerja organisasi, dengan sasaran :
 - a) Meningkatnya Sinergitas antar institusi pengelola pendapatan daerah dengan indikatornya yaitu :
 - 1) Prosentase perangkat Daerah Penghasil Kabupaten/Kota/Provinsi yang melaksanakan hasil kesepakatan
 - b) Meningkatnya ketepatan dan keakuratan penyusunan pelaporan kinerja dengan indikatornya
 - 1) Penyampaian laporan kinerja secara tepat waktu dan tepat data (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan)
 - 2) Jumlah temuan SPI antar tahun
 - 3) Tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan Internal pengawasan
 - 4) Skor penilaian evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) oleh instansi Penilai

2.1.3 Kebijakan dan Program

Agar tujuan dan sasaran tercapai dengan baik, maka diperlukan kebijakan dan program. Arah kebijakan pembangunan yang ditetapkan dalam Pembangunan Jangka Panjang daerah (PJPD) Tahun 2005 – 2025 dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PJMD) Tahun 2013 – 2018, dan sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018, kebijakan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

- a. Optimalisasi seluruh sumber daya organisasi unit pendapatan dalam meningkatkan efektivitas kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan objek-objek PAD;
- b. Memperkuat kinerja BUMD melalui peningkatan sarana, prasarana, prosedur pelayanan serta megoptimalkan peran Badan Pengawas BUMD;
- c. Memperkuat kinerja pemungutan PPh OPDN dan PPh pasal 21, Pajak ekspor, dan PPh Badan melalui validasi subjek dan objeknya, pengawasan & pengendalian serta sinkronisasi dengan instansi perpajakan nasional;
- d. Melanjutkan validasi potensi pendapatan asli daerah maupun potensi yang akan berdampak terhadap tambahan pendapatan daerah secara berkesinambungan yang kian sejalan dengan perkembangan laju pertumbuhan ekonomi;
- e. Meningkatkan pendayagunaan asset dan keuangan daerah;
- f. Meningkatkan komunikasi yang efektif dalam forum-forum koordinasi perumusan alokasi dana perimbangan;
- g. Meningkatkan komunikasi pendapatan lainnya dengan masyarakat;
- h. Melanjutkan penyempurnaan pedoman teknis pemungutan yang makin sejalan dengan ketentuan perundangan dibidang perpajakan dan retribusi;

- i. Memperkuat pengendalian kinerja seluruh perangkat pengelola pendapatan;
- j. Mengembangkan model dan rapat koordinasi yang makin efektif;
- k. Mengembangkan peluang kerjasama dan jejaring dengan berbagai pihak untuk meningkatkan potensi pendapatan daerah;
- l. Mengembangkan standar kompetensi aparat pengelola pendapatan;
- m. Memperkuat pembinaan teknis fungsional untuk seluruh OPD Penghasil;
- n. Menyempurnakan sistem reward pemungutan berbasis kinerja yang makin terukur dan teruji;
- o. Melanjutkan penyediaan prosedur pelayanan yang makin menjamin peningkatan kenyamanan dan keamanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik
- p. Menyempurnakan standarisasi sarana dan prasarana penunjang layanan pendapatan daerah
- q. Mengembangkan pusat-pusat layanan perpajakan terpadu yang terintegrasi dengan aktivitas layanan social dan ekonomi public;
- r. Memperkuat penerapan teknologi informasi yang handal sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan kinerja organisasi;
- s. Melakukan penyempurnaan model dan metode penyelenggaraan Rakor yang teruji;
- t. Meningkatkan kualitas koordinasi dengan pemerintah pusat, OPD penghasil, Kab/Kota , Unsur POLRI dan Jasa Raharja serta perbankan daerah;
- u. Mengembangkan dan menerapkan model-model pengukuran kinerja organisasi yang telah teruji

Dalam upaya mencapai target tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dari tahun 2013 – 2018, maka Dinas Pendapatan mempersiapkan langkah langkah sebagaimana yang tertuang didalam kebijakan dan program pada Renstra Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018 hingga kondisi sumberdaya organisasi yang tersedia telah dirumuskan strategi berikut :

- a) Intensifikasi dan ekstensifikasi objek pendapatan daerah dari sumber PAD yang lebih efektif;
- b) Revitalisasi peran dan skala usaha BUMD;
- c) Optimalisasi pemungutan PBB, PPh OPDN dan PPh pasal 21;
- d) Memperkuat kemampuan analisis yang makin akurat terhadap kondisi makro ekonomi Nasional dan Regional untuk kepentingan penyusunan asumsi-asumsi perhitungan pendapatan daerah ;
- e) Validasi potensi pendapatan secara berkesinambungan;
- f) Optimalisasi pengelolaan asset dan keuangan daerah;
- g) Peningkatan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dana perimbangan;

- h) Optimalisasi ruang koordinasi perhitungan dana perimbangan dengan unsure pemerintah pusat;
- i) Inisiasi sumber-sumber pendapatan dari masyarakat;
- j) Penegakkan regulasi perpajakan dan retribusi secara konsisten;
- k) Optimalisasi seluruh perangkat pendapatan pada seluruh unit pengelola pendapatan;
- l) Memperkuat pelaksanaan koordinasi pemungutan dengan seluruh *stakeholder*;
- m) Meningkatkan kompetensi pegawai yang makin kompetitif;
- n) Memberlakukan sisten reward untuk pencapaian kinerja organisasi;
- o) Menerapkan SOP yang makin teruji;
- p) Melakukan standarisasi sarana dan prasarana pengelolaan pendapatan;
- q) Meningkatkan penyediaan sentra-sentra layanan pendapatan yang pusat-pusat komunitas publik;
- r) Penerapan teknologi informasi yang relevan dengan peningkatan kinerja organisasi;
- s) Penerapan model dan metoda koordinasi pendapatan yang makin efektif;
- t) Mempertajam sistem pengendalian kinerja;

Rencana kinerja pada hakekatnya merupakan implementasi dari visi dan misi sebagai penjabaran dari tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, untuk mendukung visi dan misi tersebut maka ditetapkan 11 (sebelas) program dan 208 (dua ratus delapan) kegiatan Tahun 2016, sebagai berikut :

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Rencana kinerja pada hakekatnya merupakan implementasi dari visi dan misi sebagai penjabaran dari tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, untuk mendukung visi dan misi tersebut maka ditetapkan 11 (sebelas) program dan 208 (dua ratus delapan) kegiatan Tahun 2016, sebagai berikut :

Kinerja Organisasi pada dasarnya adalah bagaimana suatu organisasi dapat mencapai tujuan dan sasaran dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya. Selain itu juga faktor kepemimpinan dapat mempengaruhi dengan indikasi pada kemampuan pimpinan dalam membuat kebijakan yang dapat mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Untuk mengetahui rencana kinerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat tahun 2016, maka perlu adanya penjelasan dari elemen dari sasaran dan indikatornya.

Tabel Perjanjian Kinerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

SASARAN		INDIKATOR SASARAN		SATUAN	TARGET KINERJA
1	Tercapainya penerimaan pendapatan daerah	1.	Kenaikan pendapatan daerah antar tahun anggaran	%	10
		2.	Proporsi PAD terhadap pendapatan daerah (di luar dana BOS)	%	84
2	Terdatanya potensi pajak daerah dan bukan pajak daerah;	3.	Jumlah potensi wajib pajak a. Pajak Kendaraan Bermotor b. Pajak Air Permukaan c. Pajak Bahan Bakar	Kbm Wp Wapu	16juta 785 24
		4.	Jumlah Wajib Retribusi,	Wr	150
		5.	Jumlah objek penerimaan pendapatan diluar pajak daerah dan retribusi daerah	Objek	35
3.	Efektifnya pemungutan seluruh potensi penerimaan pendapatan daerah	6.	Potensi wajib pajak yang terpungut	%	75
		7.	Potensi wajib retribusi yang terpungut	%	85
		8.	Potensi objek penerimaan diluar pajak daerah dan retribusi daerah yang terpungut/ diterima	%	100
4.	Meningkatnya kualitas SDM	9.	Aparatur yang telah mengikuti pendidikan formal S1 S2	%, %	36.7 17.1
		10.	Aparatur yang telah mengikuti pendidikan teknis substantif	%	77
		11.	Aparatur yang telah memiliki sertifikat kompetensi profesi	%	11
5.	Meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan pengelolaan pendapatan daerah	12.	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	82,6
6.	Meningkatnya ketersediaan sarana, prasarana dan ketatalaksanaan pelayanan publik yang menopang pengelolaan pendapatan daerah	13.	Rasio cakupan sentra layanan perpajakan daerah terhadap wajib pajak yang dilayani per hari kerja antar tahun anggaran	Sentra layanan/jumlah wajib pajak	1:400
		14.	Ketersediaan Standar Operasional Prosedur terhadap kebutuhan	%	90

SASARAN		INDIKATOR SASARAN		SATUAN	TARGET KINERJA
		15.	Ketersediaan Standar pelayanan terhadap kebutuhan	%	100
7.	Meningkatnya modernisasi informasi layanan pendapatan daerah	16.	Tingkat gangguan jaringan dan sistem	%	1.6
		17.	Tingkat gangguan penggunaan perangkat keras	%	1.6
8.	Meningkatnya sinergitas antar institusi pengelola pendapatan daerah	18.	Perangkat Daerah Penghasil Kabupaten/Kota/Provinsi yang melaksanakan hasil kesepakatan	kali	90
9.	Meningkatnya ketepatan dan keakuratan pelaporan kinerja	19.	Tingkat deviasi pelaksanaan SOP dan SP	%	10
		20.	Penyampaian laporan kinerja secara tepat waktu dan tepat data (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan)		
		21.	Jumlah temuan SPI antar tahun	Temuan	350
		22.	Tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan internal pengawa	%	100
		23.	Skor penilaian evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) oleh Instansi penilai	%	81,5

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 641.773.572	APBD
2.	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Rp. 1.141.250.000	APBD
3.	Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah	Rp. 37.338.554.000	APBD
4.	Pengembangan Kompetensi Aparatur	Rp. 183.000.000	APBD
5.	Peningkatan Kesejahteraan Sumber daya Aparatur	Rp. 3.380.520.000	APBD
6.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 62.725.620.231	APBD
7.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 248.013.702.245	APBD
8.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 46.288.262.906	APBD

No	Program	Anggaran	Keterangan
9.	Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah	Rp. 5.743.545.000	APBD
10.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 273.758.000	APBD
11	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan	Rp. 1.225.474.500	APBD
Jumlah		Rp. 406.955.460.454	APBD

Berdasarkan indikator kinerja sasaran sebagaimana tercantum dalam rencana strategi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 berikut anggaran yang tersedia untuk Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 disusun rencana kinerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat tahun 2016 yang mencakup sasaran berikut indikator kinerjanya, program dan kegiatan yang dilaksanakan berikut indikator kinerja serta targetnya. Dari 23 Sasaran Strategis ditetapkan 9 Sasaran Strategis yang merupakan Program Unggulan yang dipenjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2016.

2.3 Program Kegiatan dan Anggaran

Komposisi belanja terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan, sedangkan belanja tidak langsung merupakan belanja yang danggarkan tidak terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Belanja langsung maupun tidak langsung dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang didanai dari Belanja Langsung terdiri dari 11 (sebelas) Program dan 208 (dua ratus delapan) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

PROGRAM/KEGIATAN	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan
1	2	3
1. Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah	641.773.572.00	546.343.572.00
1. Penyusunan Program dan Kegiatan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat	641.773.572.00	546.343.572.00
2. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	1.141.250.000.00	979.947.500.00
2. Pengelolaan Website Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat	184.300.000.00	184.300.000.00
3. Tatanan Teknis Penerapan TIK pada Sistem Informasi Dispenda Provinsi Jawa Barat	95.500.000.00	95.500.000.00
4. Penyusunan Dokumen Kajian Teknik Pemanfaatan Jaringan Internet Data Center Dispenda Jabar	90.750.000.00	90.750.000.00
5. Optimalisasi Perangkat IT Samsat Provinsi Jawa Barat	356.600.000.00	337.847.500.00
6. Penyusunan Dokumen Kajian Teknis Security Jaringan Internet Non data Center Dispenda Jabar	90.750.000.00	90.750.000.00
7. Penyusunan Aplikasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor E Samsat Via ATM	180.800.000.00	180.800.000.00
8. Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah	37.338.554.000.00	34.075.648.450.00
8. Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok I	910.096.700.00	528.001.700.00
9. Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok II Cinere	628.008.650.00	414.893.650.00
10. Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor	2.061.746.000.00	1.700.860.000.00
11. Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bogor	828.115.900.00	666.645.900.00

PROGRAM/KEGIATAN	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan
12. Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Sukabumi	539.719.800.00	515.884.800.00
13. Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak	1.224.219.650.00	1.211.529.650.00
14. Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi li Pelabuhan Ratu	945.081.350.00	853.711.350.00
15. Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur	1.361.468.000.00	1.439.667.000.00
16. Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bekasi	1.603.928.850.00	831.708.850.00
17. Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bekasi	2.080.722.750.00	1.248.534.200.00
18. Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang	1.419.140.600.00	1.311.525.600.00
19. Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta	1.214.568.200.00	1.131.688.200.00
20. Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang	1.346.671.050.00	1.445.356.050.00
21. Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cirebon	452.191.000.00	396.446.000.00
22. Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber	1.344.767.900.00	1.336.182.900.00
23. Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug	1.143.665.650.00	1.170.940.650.00
24. Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu I	1.272.335.650.00	1.323.500.650.00
25. Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis	707.736.300.00	717.386.300.00
26. Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan	1.491.435.850.00	1.516.665.850.00
27. Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka	1.459.559.850.00	1.510.294.850.00
28. Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	940.132.200.00	742.427.200.00
29. Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah	975.146.750.00	782.451.750.00

PROGRAM/KEGIATAN	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan
Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan		
30. Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta	886.566.600.00	732.291.600.00
31. Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat	988.469.600.00	883.136.600.00
32. Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek	1.110.360.900.00	1.064.810.900.00
33. Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang	1.028.636.000.00	929.334.000.00
34. Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang	1.251.331.350.00	1.291.624.850.00
35. Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Garut	1.398.737.300.00	1.505.693.800.00
36. Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya	688.610.300.00	632.650.300.00
37. Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	1.266.750.350.00	1.434.785.350.00
38. Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis	1.112.893.400.00	1.210.543.400.00
39. Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Pangandaran	690.180.000.00	736.990.000.00
40. Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cimahi	503.800.500.00	398.440.500.00
41. Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Banjar	461.759.050.00	459.044.050.00
9. Program Pengembangan Kompetensi Aparatur	183.000.000.00	393.300.000.00
42. Bimbingan Teknis Aparatur di Lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat	183.000.000.00	393.300.000.00
10. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3.380.520.000.00	3.324.598.000.00
43. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Dipenda Provinsi Jawa Barat	757.650.000.00	757.650.000.00
44. Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Depok I	67.100.000.00	67.100.000.00
45. Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Depok II Cinere	68.050.000.00	68.050.000.00
46. Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan	94.850.000.00	56.875.000.00

PROGRAM/KEGIATAN	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan
Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor		
47. Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Bogor	64.050.000.00	64.050.000.00
48. Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Sukabumi	60.660.000.00	60.660.000.00
49. Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak	70.050.000.00	70.050.000.00
50. Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu	57.950.000.00	57.950.000.00
51. Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur	62.000.000.00	62.000.000.00
52. Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Bekasi	103.600.000.00	101.040.000.00
53. Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Bekasi	89.850.000.00	89.850.000.00
54. Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang	73.200.000.00	71.970.000.00
55. Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta	78.100.000.00	76.670.000.00
56. Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Subang	61.000.000.00	61.000.000.00
57. Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Cirebon	77.700.000.00	77.700.000.00
58. Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber	74.650.000.00	74.650.000.00
59. Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug	54.900.000.00	54.900.000.00
60. Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu I	61.000.000.00	61.000.000.00
61. Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis	73.350.000.00	73.350.000.00

PROGRAM/KEGIATAN	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan
62. Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan	59.850.000.00	59.850.000.00
63. Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka	69.950.000.00	69.950.000.00
64. Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	99.100.000.00	96.800.000.00
65. Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan	85.400.000.00	85.400.000.00
66. Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta	94.550.000.00	94.550.000.00
67. Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat	118.450.000.00	129.000.000.00
68. Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek	100.450.000.00	100.450.000.00
69. Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang	103.700.000.00	100.738.000.00
70. Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang	73.200.000.00	70.920.000.00
71. Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Garut	100.250.000.00	97.750.000.00
72. Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya	67.000.000.00	65.100.000.00
73. Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	57.950.000.00	56.145.000.00
74. Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis I	71.310.000.00	65.010.000.00
75. Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis II Pangandaran	56.150.000.00	54.535.000.00
76. Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Cimahi	64.050.000.00	64.050.000.00

PROGRAM/KEGIATAN	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan
77. Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Banjar	51.850.000.00	50.235.000.00
78. Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan	57.600.000.00	57.600.000.00
11. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	62.725.620.231.00	66.370.878.979.00
79. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat	37.672.249.218.00	40.873.200.000.00
80. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Depok I	1.215.070.312.00	1.148.261.644.00
81. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Depok II Cinere	561.050.000.00	576.050.000.00
82. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor	874.155.300.00	880.635.250.00
83. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Bogor	705.333.312.00	714.481.262.00
84. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Sukabumi	600.822.856.00	609.900.856.00
85. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak	532.101.281.00	545.185.605.00
86. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu	454.223.856.00	489.507.500.00
87. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur	677.079.800.00	684.180.400.00
88. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Bekasi	999.055.312.00	998.047.550.00
89. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Bekasi	981.264.000.00	985.332.900.00
90. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang	1.254.600.000.00	1.720.964.000.00
91. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta	563.125.000.00	571.149.300.00
92. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Subang	380.960.000.00	526.760.000.00
93. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Cirebon	785.560.000.00	750.453.000.00
94. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Sumber	601.060.800.00	607.582.650.00

PROGRAM/KEGIATAN	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan
95. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug	388.245.000.00	384.495.000.00
96. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Indramayu I	690.120.000.00	697.095.000.00
97. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis	1.338.276.856.00	1.240.300.000.00
98. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan	684.220.000.00	647.675.200.00
99. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka	834.679.856.00	842.585.400.00
100. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	1.282.750.000.00	1.254.024.400.00
101. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan	741.083.312.00	736.383.263.00
102. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta	558.472.856.00	539.518.100.00
103. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat	319.930.000.00	326.655.000.00
104. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Bandung I Rancaekek	494.235.856.00	498.933.300.00
105. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang	782.040.000.00	780.273.000.00
106. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang	413.325.000.00	421.821.488.00
107. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Garut	536.837.856.00	529.530.856.00
108. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya	527.511.856.00	547.511.856.00
109. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	608.433.312.00	573.373.312.00
110. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis	577.290.856.00	578.511.583.00
111. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Pangandaran	501.740.856.00	516.740.856.00

PROGRAM/KEGIATAN	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan
112. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Cimahi	368.189.856.00	363.700.011.00
113. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Banjar	588.441.856.00	569.141.912.00
114. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan	1.632.084.000.00	1.640.917.525.00
12. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	248.013.702.245.00	206.494.871.416.01
115. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat	23.186.270.000.00	34.793.099.000.00
116. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok II Cinere	825.403.000.00	1.112.163.625.00
117. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bogor	1.031.508.000.00	1.548.208.450.00
118. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Sukabumi	527.952.000.00	772.913.216.00
119. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu	1.757.672.700.00	2.114.378.872.00
120. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur	202.000.000.00	482.969.100.00
121. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bekasi	2.016.743.000.00	2.815.179.137.00
122. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bekasi	1.101.661.000.00	2.058.104.900.00
123. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang	459.398.000.00	468.398.000.00
124. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta	250.550.000.00	542.554.450.00
125. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang	401.150.000.00	774.385.738.00
126. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cirebon	991.138.600.00	1.114.808.450.00
127. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber	819.612.000.00	773.900.078.28

PROGRAM/KEGIATAN	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan
128. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug	1.363.780.000.00	1.912.168.582.00
129. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu I	1.933.840.000.00	2.323.065.950.00
130. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan	3.344.588.000.00	3.918.744.996.00
131. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka	9.955.711.600.00	10.197.861.100.00
132. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	943.870.000.00	1.245.461.450.00
133. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan	776.570.278.00	1.265.853.978.00
134. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta	812.215.000.00	1.095.942.240.00
135. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat	749.800.000.00	993.505.950.00
136. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten I Rancaekek	1.002.493.000.00	1.285.713.700.00
137. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab Bandung II Soreang	836.582.500.00	1.502.870.500.00
138. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang	540.073.000.00	702.009.794.83
139. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Garut	525.500.000.00	1.009.301.732.00
140. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya	352.112.000.00	882.919.150.00
141. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	1.729.070.800.00	2.012.169.900.00
142. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis	354.600.000.00	1.076.259.950.00

PROGRAM/KEGIATAN	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan
143. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Pangandaran	496.492.000.00	795.587.950.00
144. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cimahi	553.526.000.00	894.173.157.00
145. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Banjar	1.094.741.000.00	1.125.595.008.66
146. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan	3.793.490.000.00	3.424.297.000.00
147. Pembangunan Gedung Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor	40.566.569.513.00	22.859.803.701.00
148. Pembangunan Gedung Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak	27.236.977.601.00	24.536.332.700.00
149. Pembangunan Gedung Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bekasi	12.572.450.000.00	12.170.125.000.00
150. Pembangunan Gedung Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten karawang	33.696.125.859.00	12.573.094.101.00
151. Pembangunan Gedung Kantor Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan	12.679.917.789.00	12.438.431.105.00
152. Pembangunan Gedung Mess dan Aula Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat di CPDP Wilayah Kota Cimahi	14.235.126.000.00	14.235.126.000.00
153. Pembangunan Gedung Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan daerah Provinsi Wilayah Kota Depok I	24.956.778.417.00	20.082.353.187.00
154. Pembangunan Gedung Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis	17.339.643.588.00	565.040.517.24
10. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	46.288.262.906.00	51.496.727.378.00
155. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Dispenda Provinsi Jawa Barat	12.348.767.541.00	15.638.411.589.00
156. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Depok I	731.265.000.00	737.439.400.00
157. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Depok II Cinere	835.398.000.00	861.005.108.00
158. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor	1.091.560.725.00	1.115.835.672.00
159. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Bogor	788.007.500.00	841.093.268.00
160. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Sukabumi	1.171.555.000.00	1.194.193.417.00

PROGRAM/KEGIATAN	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan
161. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak	745.000.000.00	756.162.688.00
162. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu	596.300.000.00	606.678.088.00
163. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur	672.693.150.00	665.827.150.00
164. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Bekasi	1.414.968.000.00	1.348.982.450.00
165. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Bekasi	839.573.000.00	851.372.704.00
166. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang	1.407.579.000.00	1.365.792.200.00
167. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta	781.640.000.00	799.047.586.00
168. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Subang	897.764.000.00	1.366.621.336.00
169. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Cirebon	1.164.794.000.00	1.124.673.500.00
170. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber	918.421.690.00	897.960.690.00
171. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug	664.773.000.00	1.009.393.000.00
172. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu I	1.057.257.000.00	945.186.350.00
173. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis	687.339.000.00	685.376.354.00
174. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan	774.568.000.00	713.169.400.00
175. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka	1.031.078.000.00	1.033.601.938.00
176. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	1.251.550.000.00	1.267.965.240.00
177. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan	1.179.296.000.00	1.292.851.240.00

PROGRAM/KEGIATAN	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan
178. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta	947.976.800.00	1.072.678.708.00
179. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat	1.756.171.500.00	2.229.416.835.00
180. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek	1.124.383.000.00	1.137.261.556.00
181. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang	1.039.989.000.00	1.061.338.570.00
182. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang	1.024.904.000.00	1.035.642.380.00
183. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Garut	1.212.090.000.00	1.185.277.914.00
184. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya	711.453.000.00	728.893.750.00
185. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	599.850.000.00	613.875.974.00
186. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis	1.489.657.000.00	1.485.942.443.00
187. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Pangandaran	723.417.000.00	1.167.861.100.00
188. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Cimahi	1.371.868.000.00	1.440.084.630.00
189. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Banjar	556.000.000.00	542.243.450.00
190. Pemeliharaan Sarana dan Prasaran Kantor Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan	679.356.000.00	677.569.700.00
11. Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah	5.743.545.000.00	5.422.020.500.00
191. Penyusunan Aplikasi dan Dashboard Info Layanan Perencanaan Pendapatan dan Belanja	167.994.000.00	210.194.000.00
192. Penyusunan Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	718.575.000.00	718.575.000.00
193. Rapat Kerja Pendapatan Daerah	459.900.000.00	426.450.000.00
194. Sosialisasi, Monitoring dan Koordinasi Pajak Daerah	1.030.800.000.00	959.300.000.00
195. Monitoring dan Evaluasi Pendapatan II	440.166.000.00	420.650.000.00

PROGRAM/KEGIATAN	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan
196. Peningkatan Kapasitas Pendapatan Sumber II	447.500.000.00	402.000.000.00
197. Peningkatan Kapasitas Pendapatan Sumber I	325.000.000.00	325.000.000.00
198. Kajian Regulasi Pendapatan	248.600.000.00	199.500.000.00
199. Rapat Kerjasama Pendapatan Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi	253.100.000.00	253.100.000.00
200. Peningkatan kapasitas Penggalan Potensi Pendapatan Daerah	978.010.000.00	816.650.000.00
201. Kapita Selektta	178.350.000.00	178.171.500.00
202. Kajian Peningkatan Pemanfaatan Aset Daerah Daerah Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah	145.550.000.00	164.050.000.00
203. Penyusunan SOP	150.000.000.00	150.000.000.00
204. Kajian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada 34 CPDP	200.000.000.00	198.380.000.00
12. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	273.758.000.00	273.758.000.00
205. Penyusunan RKA 2017, DPA Tahun 2016, DPA Pergeseran dan DPPA Tahun 2016 Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat	100.000.000.00	100.000.000.00
206. Evaluasi dan Pelaporan Internal Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat	173.758.000.00	173.758.000.00
13. Program Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan	1.225.474.500.00	1.317.754.500.00
207. Monitoring Pembinaan dan Kepatuhan Pegawai Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat	100.000.000.00	100.000.000.00
208. Evaluasi Hasil Kinerja dan Pemutahiran Dispenda Provinsi Jawa Barat	1.125.474.500.00	1.217.754.500.00
Jumlah Belanja Langsung	406.955.460.454.00	370.695.848.295.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung	342.093.242.490.00	336.106.936.170.00
Total Belanja	749.048.702.944.00	706.802.784.465.00